

SIARAN PERS

NOMOR : IP.201/1/3-BLT-2021

ASPEK PENDANAAN MERUPAKAN SALAH SATU KUNCI TERCAPAINYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

Jakarta – *Indonesia Investment Authority* (INA) badan milik negara atau otoritas yang mengelola aset finansial negara yang dibentuk oleh pemerintah sebagai kendaraan investasi milik negara yang bertujuan untuk investasi jangka panjang dan berisiko rendah. Investasi ini dapat digunakan di berbagai bidang, khususnya real estate dan infrastruktur. Hal ini tentu bersinggungan bagi perkembangan transportasi di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mengadakan webinar bertajuk Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, hari Rabu (3/2/2021).

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah, bahkan di daerah terpencil. Untuk pembangunan infrastruktur tersebut, tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai.

“Aspek pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya pada kegiatan ini.

Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menyediakan infrastruktur transportasi tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Untuk diketahui, pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan pembiayaan dalam periode yang Panjang. Oleh karena itu, kemitraan pemerintah dengan pihak swasta atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sangat diperlukan, karena peran swasta dan BUMN dapat memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan iklim investasi, serta percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun wilayah.

“Mekanisme KPBU dan lembaga internasional akan menjadi salah satu komponen penting yang harus dibangun, karena akan berpotensi meningkatkan investasi,” imbuh menhub.

Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I Tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97%. Munculnya Proyek Strategis Nasional (PSN) diharapkan dapat menjadi instrument yang dapat memulihkan perekonomian nasional.

Pada sektor transportasi, berdasarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat bahwa PSN transportasi berjumlah 33 kegiatan yang terdiri atas 16 kegiatan bidang perkeretaapian, 7 kegiatan bidang udara, dan 10 kegiatan bidang laut.

“Kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur transportasi baru bisa terpenuhi 40% dari sumber pembiayaan yang ada, jadi diperlukan alternatif skema pendanaan pembangunan infrastruktur,” ujar menhub

INA akan menjadi mitra strategis baik para investor dalam dan luar negeri, agar tersedia pembiayaan yang cukup, khususnya dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Dengan potensinya tersebut, INA menjadi alternatif yang menjanjikan bagi percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Terakhir menhub mengarahkan bahwa Kementerian Perhubungan akan menggunakan INA sebagai upaya percepatan pembangunan sektor transportasi untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati;Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely; Charge d’Affaires for the U.S. Embassy in Jakarta, Heather Variava; Chief Executive Officer Indonesia Investment Authority, Ridha Wirakusumah; serta Senior Infrastructure Finance Specialist World Bank, Jeffrey John Delmon.

**

Jakarta, 3 Maret 2021

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Email : Balitbanghub@dephub.go.id

Facebook : [balitbanghub](#)

Twitter : [balitbanghub151](#)

Instagram : [balitbanghub151](#)